

Belum Puas dengan Pencapaian

PONTIANAK - Meski sudah mendapat berbagai penghargaan dan predikat bidang pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat nasional, Wali Kota Pontianak Sutarmidji belum puas terhadap pencapaian tersebut. Menurutnya hasil yang dicapai sekarang belum maksimal, mestinya lebih dari itu. "Mengapa saya belum puas karena kita bisa



Sutarmidji

lebih dari pencapaian tersebut," ungkapnya.

kendati Kota Pontianak meraih ranking keenam dalam pelayanan publik secara nasional tahun lalu. KPK juga menjadikan kota ini sebagai *pilot project* zona integritas. Tak hanya itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya memberi predikat wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan keuangan.

Untuk meraih capaian maksimal, Sutarmidji meminta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak benar-benar secara serius menangani semua persoalan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. "Memang ini hasil kerja semua jajaran di Pemkot Pontianak, tapi mestinya kinerja terus ditingkatkan. Tidak boleh puas dengan hasil yang telah diraih," katanya.

Terkait pelayanan publik, Sutarmidji menyayangkan masih ada SKPD yang menghambat pelayanan terutama izin mendirikan bangunan (IMB). Perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) yang membuat masyarakat bingung untuk mengurus IMB, harusnya ada pengarahan dari instansi terkait. IMB yang dulunya melalui dinas tata ruang (sekarang dinas cipta karya, tata ruang dan perumahan) namun sekarang hanya satu pintu melalui badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T). "Ketidaktahuan masyarakat dalam pengurusan harusnya diarahkan, jangan didiamkan saja. Misalnya orang memasukkan berkas permohonan IMB ke cipta karya, harusnya cipta karya memberitahukan kepada pemohon agar memasukkannya melalui BP2T," ujarnya.

Sutarmidji mengingatkan kepada instansi tersebut agar kejadian serupa tidak terjadi. "Karena sekarang adalah masa transparansi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi," tuturnya. (hen)